



**PARALEGAL
JUSTICE
AWARD
2023**



URGENSI DAN LATAR BELAKANG

Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada *over capacity*-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase *over capacity* sebesar 109%.

Layanan bantuan hukum merupakan salah satu program prioritas pemerintah tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat meminimalisir setiap warga yang berperkara untuk diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, yakni secara nonlitigasi. Jalur non litigasi diantaranya berupa kegiatan preventif seperti Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan represif adjudikatif berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik lainnya yang pada prinsipnya diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat dijadikan sebagai *Primary Legal Aid* yang mengarahkan bahwa tahap awal dari setiap penyelesaian perkara harus melalui jalur nonlitigasi terlebih dahulu. Data kajian *Legal Needs Survey* yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) yang bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2019, 60% pihak yang paling sering dipilih oleh masyarakat di pedesaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan selain keluarga antara lain ialah ketua adat, tokoh agama, atau ketua komunitas. Artinya Kepala Desa yang rata-rata sekaligus sebagai ketua adat, tokoh agama, atau ketua komunitas di masyarakat desa dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dari aspek ekonomi, Kepala Desa pun dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama investasi, pariwisata, dan lapangan kerja. Tumbuhnya ekonomi menjadikan desa menjadi sejahtera yang secara tidak langsung mengurangi pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Maka dari itu, bagi Kepala Desa/Lurah yang telah berperan dalam penyelesaian perkara secara non litigasi diberikan penghargaan *Non Litigation Peacemaker* dan bagi Desa/Kelurahan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (investasi, pariwisata, dan lapangan kerja) mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*. Sedangkan bagi Kepala Desa/Lurah yang menjadi *Non Litigation Peacemaker* dan Desa/Kelurahan yang menjadi *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* mendapatkan Anugerah *PARALEGAL JUSTICE AWARD*.



PENDAFTARAN & SELEKSI ADMINISTRASI

Pengumuman dan Pendaftaran diperpanjang hingga 12 April 2023 yang dilakukan secara elektronik dengan link formulir yang disiapkan Panitia dengan persyaratan :

Target
1.000



Jabatan Kepala Desa/Lurah

Sedang menduduki jabatan Kepala Desa/Lurah (dibuktikan dengan SK)



KTP

KTP discan dan diunggah pada link yang ditentukan panitia



DRH

Daftar Riwayat Hidup dengan data ter-update



Pas Foto 4X6

Foto 4X6 berwarna *background* putih diunggah pada link yang ditentukan panitia



Surat Perintah/Tugas

Mengunggah Surat Perintah/Tugas Mengikuti Kegiatan dalam bentuk file Pdf yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang



Pengalaman Peran Paralegal

Bukti pengalaman peran Hakim Perdamaian di Desa berbentuk :
Narasi cerita pengalaman singkat maks 2 halaman, Video portofolio (durasi maksimal 2 menit), link berita/media massa, dan/atau dokumentasi bukti bentuk lainnya



SELEKSI ADMINISTRASI & AUDISI



Regional Barat

- Pulau Sumatera;
- Pulau Jawa;



Regional Tengah

- Pulau Kalimantan;
- Pulau Sulawesi;



Regional Timur

- Pulau-pulau lainnya wilayah timur hingga papua;

Audisi/Seleksi dilakukan secara online. Target 500

Juri berasal dari BPHN (JF PH)

- Dilakukan setelah Seleksi Administrasi dari Persyaratan Pendaftaran;
- Proses dilakukan serentak;
- Rentang waktu 1 pekan, minggu ke-1 bulan maret;
- Peserta lulus lanjut ke Diklat di *Paralegal Academy* BPHN.



PARALEGAL ACADEMY

Target
300

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal bagi Kepala Desa/Lurah setelah Lulus Audisi



9 Materi Bahan Ajar

9 Materi disertai Pre-Test dan Post-Test

Narasumber/Pengajar

9 Pengajar masing-masing 120 menit *on-class*

3 Hari Diklat

3 hari penyelenggaraan disertai Pameran

Periodesasi Diklat

Perlu dibatasi jumlah Peserta pada setiap kelas dan angkatan

Modul Diklat

Penyusunan Modul disertai soal-soal Pre-Test dan Post-Test

Pedoman *Paralegal Academy*

Sebagai dasar penyelenggaraan dan manajemen pelaksanaan Diklat khusus bagi Kepala Desa

Seluruh peserta tetap mendapatkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Desa

ELIMINASI

Dilakukan setelah Peserta mengikuti Diklat dan Lulus Ujian

Target
150 - 300

01

Full Absensi Diklat

02

Mengikuti Pre-Test &
Post-Test

03

Presentasi Kompetensi dan Eksistensi
Hakim Perdaian Desa (*Portfolio*)
dan Kualifikasi Desa Pendorong
Ekonomi



Nominasi
*Non Litigation
Peacemaker*


Diberikan kepada Kepala Desa yang berdasarkan **Track Record**-nya di desa/kelurahan selalu menyelesaikan konflik secara non litigasi, **Kebijakan-kebijakan** yang dikeluarkan seperti peraturan desa secara akomodatif dan partisipatif mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, dan **Sarana/Prasarana** yang ada di desa mendukung pemberdayaan masyarakat desa seperti adanya PAMSIMAS, Bank Sampah Desa, Bale Mediasi, dsb.

Kades/
Lurah

Nominasi
*Anubhawa Sasana
Desa Jagaddhita*

Bagi Kepala Desa/Lurah yang memenuhi kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tematik yang mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja diberikan pula anugerah **Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita**.

Desa/
Kelurahan



Finalis
150 besar

KRITERIA



Track Record



Kebijakan
Desa/Kelurahan



Sarpras
Desa/Kelurahan

NOMINASI *PARALEGAL JUSTICE AWARD*

*Paralegal Justice Award diberikan kepada Kepala Desa yang memenuhi kriteria sebagai **Non Litigation Peacemaker** dan **Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita***

Anugerah ini dapat dijadikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk membuktikan kepada masyarakat, media, dan pengambil kebijakan di pusat bahwa peran Kepala Desa hadir dalam setiap permasalahan hukum dan sebagai wadah pertimbangan untuk tambahan masa jabatan menjadi 9 tahun.

ANGGARAN

APBN



- Pelaksanaan *Paralegal Academy* selama 3 hari 2 malam;
- Penganugerahan *Paralegal Justice Award (Non Litigation Peacemaker & Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita)*;
- Akomodasi (Hotel dan Paket Meeting).

APBD/APBDes/DD



Perjalanan Dinas
Peserta (Kepala Desa);

PENGANUGERAHAN *PARALEGAL JUSTICE AWARD* KEPADA KEPALA DESA SEBAGAI *NON LITIGATION PEACEMAKER* DAN PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TEMATIK DENGAN ANUGERAH *ANUBHAWA SASANA DESA JAGADDHITA*

No.	Agenda	Waktu																				Keterangan
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Persiapan pelaksanaan																					
2	Pengumuman dan pendaftaran peserta																					10 Feb 2023 s.d.12 April 2023
3	Seleksi Administrasi																					13 s.d.30 April 2023
4	Audisi Peserta																					01 s.d. 14 Mei 2023
5	Pengumuman Hasil Audisi																					15 Mei 2023
6	Persiapan <i>Paralegal Academy</i>																					Penentuan Venue dan metode pelaksanaan
7	<i>Paralegal Academy</i>																					28 Mei 2023 s.d. 31 Mei 2023
8	Eliminasi																					31 Mei 2023
9	Nominasi <i>Non Litigation Peacemaker</i> dan <i>Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita</i>																					1 Juni 2023 (Siang)
10	Penyerahan Anugerahan <i>Paralegal Justice Award</i>																					1 Juni 2023 (Malam)



Dalam rangka memberi kesempatan
bagi para Kepala Desa/Lurah

**PENDAFTARAN
PARALEGAL JUSTICE AWARD
DIPERPANJANG !!!**

Sampai dengan **12 APRIL 2023**

<https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>

**KEPALA DESA/LURAH
SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA!!**



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person

0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)





Persyaratan:

- ✓ SK Kepala Desa/Lurah
- ✓ KTP
- ✓ Daftar Riwayat Hidup
- ✓ Foto
- ✓ Surat Perintah/Tugas
- ✓ Video Praktik Penyelesaian Konflik

Reward:

- Pendidikan Paralegal Desa
- Sertifikat Paralegal Desa
- Piagam *Non Litigation Peacemaker* dan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*
- Piala Anugerah ***Paralegal Justice Award***

DAFTAR SEKARANG!

<https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>



Batas Pendaftaran
8 Maret 2023



Informasi Selengkapnya di:

www.bphn.go.id

Contact Person

0821-6817-8530 (Dorma)

0822-2022-5605 (Susan)



Persyaratan Non Litigation Peacemaker

1. Masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/Lurah dibuktikan dengan SK
2. Kartu Tanda Penduduk yang di-scan dan diunggah pada link
3. Foto 4x6 dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah background putih
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Bukti pengalaman Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berbentuk :
 - a. cerita pengalaman singkat maksimal 2 halaman;
 - b. video dokumentasi kerja (durasi maksimal 2 menit);
 - c. link berita/media massa;
 - d. dokumen bukti bentuk lainnya;
 - e. Surat Perintah/Surat Tugas.

Persyaratan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita

1. Merupakan Desa Sadar Hukum/Calon Desa Sadar Hukum
2. Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat
3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum
4. Dokumentasi penyelesaian permasalahan/sengketa di luar proses hukum oleh lembaga/tokoh masyarakat desa
5. Dokumentasi hasil kerja terkait upaya kelayakan investasi, peningkatan sector pariwisata dan pembukaan lapangan kerja
6. Surat Pernyataan calon penerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita yang tidak tersangkut kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya.



Tanggal Penting

Pengumuman dan Pendaftaran

10 Februari s.d. 8 Maret 2023

Seleksi Administrasi

13 s.d. 24 Maret 2023

Audisi Peserta

27 Maret s.d. 14 April 2023

Pengumuman Hasil Audisi

5 Mei 2023

Paralegal Academy

28 s.d. 31 Mei 2023

Eliminasi Paralegal Academy

31 Mei 2023

Malam Penganugerahan

1 Juni 2023

Lulusan terbaik *Paralegal Academy* akan mendapatkan penghargaan Kepala Desa/Lurah sebagai
Non Litigation Peacemaker

Desa/Kelurahan Terbaik akan mendapatkan penghargaan

Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita

Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang juga mendapatkan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* akan diberikan:

PARALEGAL JUSTICE AWARD



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)





PIALA bagi Penerima
Paralegal Justice
Award



Uniform bagi Kepala
Desa/Lurah sebagai
Non Litigation Peacemaker



PIN bagi Kepala Desa/Lurah
sebagai *Non Litigation*
Peacemaker

On Progress :

- Sertifikat Gelar Non Akademik oleh Menteri Hukum dan HAM (NL.P);
- Medali *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*.